



Penerapan Demokrasi Pendidikan: Kepemimpinan Guru dalam Membentuk Karakter Siswa

Shella Satiwi Guci^{1*}, Firman² & Riska Ahmad³

Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRACT

Education is the need of every individual. In education there is always progress in a better direction, such as the realization of educational democracy in learning, which includes the idea of giving students freedom to express opinions, surrender and equal opportunities without differences in ethnicity, race or class. This study uses the literature review method, where information is obtained from journals, articles, and websites on the internet, and is analyzed with a qualitative approach using data analysis techniques in the steps of information retrieval, data reduction, data presentation, and inference. The results of the study show that students are currently not only used as learning objects, but also as interlocutors in the learning process. Therefore, it is hoped that teachers will succeed in creating a democratic learning environment for students in such a way that the character of students is formed.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 December 2022
Revised 24 December 2022
Accepted 31 December 2022

KEYWORDS

Educational Democracy; Teacher Leadership; Student Character

CITATION (APA 6th Edition)

Guci, S, S. Firman. & Ahmad, R. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan: Kepemimpinan Guru dalam Membentuk Karakter Siswa. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian*. 10(2), 75-61.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

Shelasguci@gmail.com.

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang. Pemerintah juga mensyaratkan wajib belajar, atau dalam arti anak Indonesia harus belajar selama 12 tahun. Aristoteles mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu tugas negara dan dipraktikkan terutama untuk kebaikan negara itu sendiri atau untuk kebahagiaan manusia. Di Indonesia pendidikan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang pendidikan nasional. Dalam pasal ini dijelaskan semua mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, peserta didik, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan wajib belajar.

Setelah masa reformasi, kehidupan masyarakat Indonesia menjadi serba terbuka dan transparan. Berbeda dengan era Orde Baru yang tertutup dan tertutup, orang-orang semakin tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Salah satu tuntutan masyarakat saat itu adalah adanya sistem demokrasi. Sejak masa reformasi, demokrasi telah dipulihkan. Hal ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan yaitu adanya demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dan adil terhadap semua siswa oleh guru tanpa adanya unsur diskriminatif baik di dalam kelas maupun dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas. Demokrasi pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dalam pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras dan juga status sosial, sehingga peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat dan mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan.

Konsep pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi demokrasi pendidikan adalah proses pendidikan yang menghargai potensi,



persamaan dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara optimal. Tanpa memandang atau membedakan suku, agama maupun budaya. Selanjutnya pada kondisi yang sebenarnya, dalam pembelajaran tidak sedikit ditemukan kebebasan dalam pendidikan yang masih dibatasi maupun adanya perilaku yang membedakan. Yang mana antara kaya dan miskin, pintar dan yang kurang pintar yang masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran dan tak terkecuali dalam pembelajaran peserta didik masih banyak sikap perbedaan perlakuan dari tenaga pendidik terhadap peserta didik, sehingga banyak peserta didik yang tidak berani menunjukkan keberadaannya pada saat proses pembelajaran.

Dengan demokrasi pendidikan ini diharapkan juga para peserta didik dapat ikut aktif dalam menyampaikan pendapat di dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya sebagai objek dari kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran. Maka selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan tentang penerapan demokrasi pendidikan dalam kegiatan belajar siswa di sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Studi kepustakaan identik dengan penelitian kepustakaan, tinjauan kepustakaan, landasan teori, kajian teori dan telaah kepustakaan. Kemudian data yang sudah dikumpulkan akan di susun sesuai dengan topik yang akan dibahas dan data dianalisis dan selanjutnya penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan yang terdapat pada bagian penutup.

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Sedangkan demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas mengandung tiga hal yaitu; (1) Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, (2) Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat, dan (3) Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Pendidikan yang demokratis ialah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan merupakan proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pendidikan

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah- masalah antara lain :

- a. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
- b. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan
- c. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka

Dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada, karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya. Apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan, diantaranya :

- a. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada;
- b. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik;
- c. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional.

Sedangkan pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi, akan selalu memperhatikan prinsip- prinsip berikut ini :

- a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
- b. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur
- c. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Kebudayaan sebagai Demokrasi Pendidikan

Penanaman karakter adalah hal yang sah dan tentu saja tidak bisa diacuhkan dalam fungsi pendidikan. Ada berbagai macam karakter moral yang merupakan hasil kesadaran sosial dan bagian dari demokrasi yang ditanamkan secara sah. Siapa yang sebaiknya memutuskan karakter yang bagaimana yang harus ditanamkan?. Amy Guttmann telah menguji dan menolak tiga teori yang populer dan memiliki filosofis yang kuat. Teori – teori tersebut adalah :

- a. The family state theory

Teori ini mengatakan bahwa otoritas pendidikan berada ditangan Negara.

- b. The state family theory

Teori ini menempatkan otoritas pendidikan secara eksklusif berada ditangan orang tua, tidak didasarkan pada asumsi bahwa orang tua mempunyai hak azasi untuk menentukan otoritas sehingga tercapai kesejahteraan untuk anak–anak mereka.

- c. The state of individual theory

Teori ini menolak untuk meletakkan otoritas pendidikan ditangan siapapun tanpa jaminan bahwa pilihan- pilihan anak-anak tidak akan dirugikan, sesuai dengan cara hidup dan tidak bertentangan dengan orang lain.

Jika suatu Negara yang menerapkan demokrasi pendidikan tidak menjamin kebaikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau otonomi keluarga atau kenetralan dalam pandangan hidup, apa gunanya pendapat dalam berbagi otoritas pendidikan? Pembagian otoritas pendidikan antara warga Negara, orang tua dan tenaga pendidik professional mendukung nilai inti dari demokrasi. Conscious social reproduction dalam demokrasi adalah bentuk yang sangat inklusif. Tidak seperti teori family state, democratic state mengenalkan nilai pendidikan orang tua dalam mengabadikan konsep hidup yang baik. Tidak seperti teori state of family, democratic state mengenalkan nilai otoritas professional yang memungkinkan anak anak untuk menghargai dan untuk mengevaluasi pandangan hidup selain dari yang diberikan oleh keluarga mereka. Tidak seperti teori state of individual, democratic state mengenalkan nilai pendidikan politik dalam mempengaruhi anak-anak dalam menerima pandangan hidup yang konsisten dengan membagi hak dan kewajiban warga Negara dalam masyarakat demokrasi.

Sekolah dasar merupakan salah satu tempat dilaksanakannya pendidikan demokrasi. Penerapan demokrasi pendidikan pada pembelajaran di sekolah dasar bagi sebagian besar siswa masih banyak digunakan sebagai mata pelajaran, dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan masih sedikit manfaat dalam menyampaikan sanggahan atau pendapat. Dengan diberlakukannya kurikulum 2013, yang juga menuntut siswa untuk belajar aktif, penerapan pendidikan demokrasi dalam pelajaran sekolah dasar kini telah dimulai. Sehingga siswa tidak begitu saja menerima materi yang diberikan oleh pendidik atau guru, tetapi memiliki kesempatan untuk membantahnya atau aktif berdiskusi dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kurikulum (2013) dimana model pembelajaran yang diusulkan guru adalah model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pemecahan masalah dan penemuan dengan menggunakan metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi dan bermain peran, perdebatan atau metode lain yang relevan. Maka model dan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan berperan sebagai non-spesialis dan terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. tetapi juga dapat berperan aktif dalam diskusi pembelajaran. Dari situ, siswa juga bisa menghargai dan menerima perbedaan pendapat temannya dengan guru sebagai validasi di akhir diskusi. Selain itu, dengan adanya kurikulum 2013, pembelajaran tidak lagi sepihak tetapi lebih interaktif. Dari sinilah penerapan demokrasi pendidikan pada pembelajaran di sekolah dasar mulai terwujud, karena semua pihak terlibat dalam pembelajaran bagaimana mengemukakan pendapat, memberi jawaban dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran tanpa diskriminasi.

SIMPULAN

Demokrasi pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang menerapkan nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya. Pembelajaran dilaksanakan secara adil tanpa ada sikap membedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam proses pendidikan dan peserta didik tidak hanya menjadi objek semata dalam proses pendidikan tetapi ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam hal memberi tanggapan, bertanya, ataupun yang lainnya. Penerapan demokrasi dalam pendidikan terhadap pembelajaran di sekolah masih sangat sedikit penerapannya karena kebanyakan pembelajaran dalam sekolah peserta didik dijadikan sebagai objek pembelajaran yang menerima dan mendengarkan materi dari pendidik. Namun ketika ada pembaharuan kurikulum tepatnya Kurikulum 2013, demokrasi pendidikan mulai banyak diterapkan dalam pembelajaran karena peserta didik dituntut untuk aktif dan juga dalam pembelajaran seperti menyampaikan pendapat, menjawab ataupun yang lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran merupakan hal yang penting agar terciptanya keadilan pada setiap individu dalam mendapatkan setiap hak dalam pendidikan.

REFERENSI

- Ansyar, Mohammad. 1989. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Depdikbud Dikti.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pustaka Widyatama.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad noor. 1983. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Setiyadi, A. C. (2010). *Konsep demokrasi pendidikan menurut john dewey*. *At-Ta'dib*, 5(1).
- Sinambela, P. N. (2017). *Kurikulum 2013 dan implementasinya dalam pembelajaran*. *Generasi Kampus*, 6(2).
- Syam, Mohammad Noor. 1986. *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tillar. R. 1979. *Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta.